DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020
1 S.D. 5 MARET 2020

*

**

***

**

*

JAKARTA 2020

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI

KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020

1 S.D. 5 MARET 2020

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
   a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
   b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020.
4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Februari 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan, berdialog untuk mendapatkan masukan langsung dari pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra kerja Komisi IV DPR RI sehubungan dengan realisasi dan

kendala dari program dan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Menyerap aspirasi masyarakat dan meminta usulan pemerintah daerah sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan program pembangunan daerah.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	Sudin, S.E.	Ketua Komisi IV/F.PDIP
2.	H. Sunarna, S.E., M.Hum.	Anggota/F.PDIP
3.	Drs. I Made Urip, M.Si.	Anggota/F.PDIP
4.	Ono Surono, S.T.	Anggota/F.PDIP
5.	Riezky Aprilia, S.H., M.H.	Anggota/F.PDIP
6.	H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M,	Anggota/F.PG
7.	A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.	Anggota/F.PG
8.	Alien Mus, S.H.	Anggota/F.PG
9.	Ir. Sumail Abdullah	Anggota/F.Gerindra
10.	Azikin Solthan, M.Si.	Anggota/F.Gerindra
11.	Fauzi H. Amro, M.Si.	Anggota/F.NasDem
12.	H. Charles Meikyansyah	Anggota/F.NasDem
13.	Farida Hidayati, S.H., M.Kn.	Anggota/F.PKB
14.	Muslim, S.HI., M.M.	Anggota/F.PD
15.	Dr. Hermanto, S.E., M.M.	Anggota/F.PKS
16.	H. Johan Rosihan, S.T.	Anggota/F.PKS
17.	H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.	Anggota/F.PAN
18.	Slamet Ariyadi, S.Psi.	Anggota/F.PAN

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 s.d. 5 Maret 2020.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Meninjau dan diskusi di lokasi pembesaran lobster di Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
2. Meninjau Taman Nasional Gunung Rinjani.
3. Meninjau dan diskusi di lokasi pengembangan kawasan bawang putih di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur.
4. Meninjau Gudang Bulog di Sweta, Kota Mataram.
5. Meninjau Gudang Pupuk di Cemare, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
6. Meninjau Pabrik Pengolahan Benih PT Sang Hyang Seri (Persero) di Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah.

F. GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 8 o 10’- 9 o 5’ Lintang Selatan dan 115 o 46’- 119 o 5’ Bujur Timur. Luas Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,15 km2. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki batas-batas: Utara – Laut jawa dan Laut Flores; Selatan – Samudera Hindia; Barat – Selat Lombok dan Provinsi Bali; Timur – Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni dari 280 pulau yang ada. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km2 (76,46 %) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat dan luas Pulau Lombok mencapai 1/3 saja. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m dari sembilan gunung yang ada.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Pusat Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat di Kota Mataram Pulau Lombok. Selong merupakan Kota

yang memiliki ketinggian paling tinggi, yaitu 166 m dari permukaan laut, sementara Taliwang terendah dengan 11 m dari permukaan laut. Kota Mataram sebagai tempat Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki ketinggian 27 m dari permukaan laut.

Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 mencapai 4.587.562 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.228.493 jiwa dan perempuan sebanyak 2.359.069 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,46. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 sebanyak 4.587.562 orang meningkat sebesar 3,03% atau 41.912 orang dibandingkan dengan penduduk tahun 2011. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sektor perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh sektor primer yakni sektor pertanian dan pertambangan. Konstribusi sektor pertanian mencapai 25,69%, sedangkan kontribusi sektor pertambangan mencapai 18,63%. Peran sektor sekunder seperti industri pengolahan masih relatih kecil. Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian sebesar 3,91%. Dilihat dari penggunaan PDRB yang tercipta di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 54,22% digunakan untuk konsumsi masyarakat dan 31,03% digunakan untuk kegiatan investasi. PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun meski pada 2 tahun terakhir ada penurunan.

Profil Petani dan Wilayah Sembalun

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu wilayah penghasil berbagai jenis sayuran dataran tinggi yang sangat potensial. Salah satu komoditas sayuran yang berkembang secara turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang adalah bawang putih dengan sentra terbesar terletak di Kecamatan Sembalun.

Sembalun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang terletak di kaki Gunung Rinjani yang memiliki luas wilayah 21.708 km^2 dan memiliki 6 (enam) desa masing-masing Desa Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Sembalun Timba Gading, Sembalun, Sajang, dan Bilok Petung. Kecamatan Sembalun berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut, dengan type iklim C dan D4. Suhu berkisar antara 17^0C – 26^0C dengan kelembaban rata-rata 91 % dan curah hujan dapat mencapai 2.000 s.d. 3.000 mm/th

yang berlangsung dari bulan Oktober sampai dengan Mei dengan jumlah hari hujan antara 100 – 132 hh/th.

Luas hamparan lahan yang potensial untuk pengembangan berbagai jenis sayuran dataran tinggi kurang lebih 3.915 hektar, baik yang berpengairan irigasi maupun tegalan/kebun yang sangat cocok ditanami sayuran seperti kentang, bawang putih, wortel, bawang daun, kubis, dan komoditas sayuran dataran tinggi lainnya. Dari luasan tersebut 1.155 ha terdiri dari lahan sawah, 2.800 ha merupakan lahan tegalan dengan jumlah petani sekitar 900 orang dengan status kepemilikan tanah hak milik. Dari luasan tersebut potensi pengembangan bawang putih di Sembalun sekitar 1.162 ha (sumber: BBPSDLP).

Berdasarkan data BPS Tahun 2019 (angka sementara), sentra bawang putih nasional terbesar terdapat di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat memiliki *share* produksi sebesar 30.453 ton setara dengan 34,4% terhadap total produksi bawang putih nasional sebesar 88.437 ton dimana Lombok Timur memiliki kontribusi produksi sebesar 17.235 ton setara dengan 56,6% terhadap produksi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kecamatan Sembalun.

Potensi untuk pengembangan bawang putih di Kecamatan Sembalun sangat besar. Mengingat keberhasilan budi daya bawang putih di tahun 1984-1995 maka tidak mustahil kejayaan itu dapat dikembalikan lagi. Permasalahan terbesar yang menghambat usaha tersebut adalah tidak adanya kepastian harga bawang putih dikarenakan serbuan produk bawang putih impor yang harganya jauh lebih murah sehingga petani harus berfikir keras untuk menentukan komoditas yang akan mereka usahakan.

Musim tanam bawang putih di Sembalun terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Desember – Januari (lahan tadah hujan), April – Mei (lahan berpengairan teknis), dan Juni – Juli (musim kemarau). Data luas tanam (ha) bawang putih 3 tahun terakhir di Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

Tabel Data Kawasan Bawang Putih Kabupaten Lombok Timur

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2017	357	348	4.705	13,52
2018	722	714	8.193	11,47
2019*	1.528	1.453	17.235	11,86

Sumber: BPS diolah, *) angka sementara.

Varietas yang umum ditanam yaitu Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Sangga Sembalun merupakan varietas lokal yang merupakan bawang putih asli dari Kabupaten Sembalun. Ciri khasnya adalah aroma yang lebih tajam karena kandungan alicin yang lebih tinggi dibandingkan bawang putih impor (varietas *Great Black Leaf* (GBL)). Keunggulan komparatif ini merupakan suatu hal yang perlu terus didorong untuk meningkatkan preferensi konsumen terhadap penggunaan bawang putih lokal. Kabupaten Lombok Timur memiliki lebih dari 10 (sepuluh) orang penangkar benih bawang putih yang siap untuk mencukupi kebutuhan benih lokal dan regional. Selain itu, sebanyak 187 ton benih di beberapa penangkar tersebut sudah siap untuk disalurkan (patah dorman). Berikut daftar beberapa penangkar bawang putih di Kabupaten Lombok Timur dan ketersediaan benih di beberapa penangkar:

Tabel Data Penangkar dan Stok Benih Bawang Putih
Kabupaten Lombok Timur

Penangkar	No. HP	Volume stok tersedia (ton)		Varietas	Penanaman		Pemeriksaan BPSB	Perkiraan Panen
		Patah Dorman	Dorman		Luas Tanam (Ha)	Bulan		
Angga (UD Serba Usaha Angga)	087763229007	70	0	SS	10	Des-Jan 2020	Feb-20	April-Mei 2020
		50	0	LH				
Sanusi (KT Lendang Daya)	087864134277	0	80	SS	60	Des-Jan 2020	Feb-20	April-Mei 2020
		0	100	LH				
		0	50	LP				
Ruspaeni Efendi S.	087763031741	20	0	SS	13,5	Des-Jan 2020	Feb-20	April-Mei 2020
		5	0	LP				
Khaerul (UD Aik Makam)	081997931348	12	0	SS		rencana tanam bulan Maret-April 2020		
Ahmad (KT Montong Mentagi)	081936241549	15	0	SS				
		0	30	SS	100	Des-19	Jan-20	Apr-20
Johansyah (KT. Kharisma Rinjani)	081918366606	15	0	SS	7,6	Nov-des 2019	Des 2019-Jan 2020	Maret-April 2020
TOTAL		**187**	**260**		**191,1**			

Sumber: Dit. Perbenihan Hortikultura.

G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

G.1. Lokasi Pembesaran Lobster

Pada saat pertemuan, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan dari Bupati Lombok Timur, bahwa lobster merupakan salah satu komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi dan berharap Kabupaten Lombok Timur menjadi sentra lobster nasional, yang dapat diekspor serta menjadi sumber pendapatan bagi Kabupaten Lombok Timur. Namun demikian terdapat dua pendapat antara yang menginginkan eskpor benih dengan budi daya ekspor. Selain itu, dalam pertemuan

kali ini terungkap mengenai beberapa kebutuhan, antara lain berupa bantuan infrastruktur, alat tangkap dan budi daya (seperti bantuan keramba jaring bawah), hingga *cold storage*. Pada pertemuan ini juga terungkap keinginan untuk mengkaji Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia terutama terkait pasal larangan kepada setiap orang untuk menjual benih lobster untuk budi daya.

Pada kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa potensi besar untuk budi daya lobster yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur harus dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik. Namun jangan sampai pemanfaatan dan pengembangannya merusak lingkungan. Selanjutnya, pihak pembudi daya juga harus melakukan inovasi dan terobosan dalam perbenihan serta memanfaatkan teknologi dalam usaha budi dayanya. Komisi IV DPR RI juga menyampaikan bahwa pembudi daya lobster melalui dinas setempat memanggil pakar, misalnya dari negara Vietnam untuk mempelajari tekonologi budi daya lobster yang lebih maju. Selain itu, Komisi IV DPR RI mengingatkan agar dalam pemanfaatan dan pengelolaan budi daya lobster, khususnya untuk ekspor harus menghitung kebutuhan lobster dalam negeri terlebih dahulu.

Dalam pertemuan ini juga, terdapat beberapa temuan dan kebutuhan di luar komoditas lobster, antara lain kebutuhan pakan untuk tambak nila, dan lain-lain.

JUMLAH PEMBUDIDAYA LOBSTER DI KAB. LOMBOK TIMUR

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PERAIRAN	JUMLAH PEMBUDIDAYA	JUMLAH KJA (LUBANG)
1	JEROWARU	JEROWARU	TELUK JUKUNG	119	786
2	PARE MAS	JEROWARU	TELUK JUKUNG	365	2613
3	SEKAROH	JEROWARU	TELUK JUKUNG	30	30
4	KETAPANG RAYA	KERUAK	TELUK JUKUNG	19	47
5	TANJUNG LUAR	KERUAK	TELUK JUKUNG	20	150
6	MARINGKIK	KERUAK	TELUK JUKUNG	51	51
7	PEMONGKONG	JEROWARU	TELUK JUKUNG	20	175
8	EKAS BUANA	JEROWARU	TELUK EKAS	205	1454
9	WAKAN	JEROWARU	TELUK EKAS	26	108
10	BATUNAMPAR SELATAN	JEROWARU	TELUK EKAS	149	596
11	SERIWE	JEROWARU	TELUK SEREWI	17	37
JUMLAH				**1021**	**6047**

Secara detail, beberapa permasalahan yang disampaikan pembudi daya lobster Lombok Timur diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengharapkan ke depan Nusa Tenggara Barat menjadi sentra budi daya lobster dan udang.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membangun 650 unit KJA.
3. Nelayan meminta agar dapat diberikan bantuan alat tangkap dan fasilitas budi daya.
4. Lahan budi daya mencapai 500 ha.
5. Ukuran berat di atas 200 gram per ekor yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 sangat memberatkan nelayan, nelayan berharap ukuran 150 gram.
6. Pembudi daya resah dengan adanya permainan harga oleh tengkulak.
7. Pembudi daya mengeluhkan harga lobster yang mencapai angka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
8. Pemudi daya berharap kepada Pemerintah agar ada jaminan harga lobster.
9. Pembudi daya mengeluhkan mahalnya biaya pakan.
10. Pembudi daya lobster menolak ekspor benih lobster, pembudi daya khawatir apabila benih diekspor maka akan kesulitan untuk memasarkan hasil budi daya.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI meminta pembudi daya lobster untuk meningkatkan kemampuan budi daya sehingga perlu mendatangkan ahli dari luar serta mengusulkan agar melibatkan swasta untuk transfer teknologi.
2. Komisi IV DPR RI meminta masyarakat dalam melakukan budi daya harus menjaga kelestarian lingkungan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan fasilitas maupun sarana dan prasarana budi daya serta meminta Pemerintah untuk mencari negara tujuan pasar lobster yang lebih menguntungkan bagi pembudi daya lokal.
4. Komisi IV DPR RI mendukung Nusa Tenggara Barat menjadi sentra budi daya lobster nasional.

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki tata niaga dalam rangka menjamin harga agar pembudi daya lokal tidak dipermainkan oleh tengkulak.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada BUMN untuk menyerap hasil perikanan maupun garam yang tidak terserap oleh pasar serta meminta kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk menjaga agar tidak terjadi penyelundupan.

G.2. Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh pengelola TNGR selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rinjani Meriri atau Rinjani berbenah berupa proses, memotret, menggali, merumuskan, menata, dan mengembangkan potensi Rinjani yang lebih baik sehingga manfaat lebih optimal.
2. Jalan damai mengelola TNGR dengan melakukan penyelesaian tentang pengelolaan Otak Kokoq Joben dan penanganan pemanfaatan kawasan tanpa izin (PKTI) hutan Pesugulan melalui mekanisme kerja sama pengelolaan dan kemitraan konservasi.
3. Rinjani Begawe berupa momen pembukaan jalur dan dimulainya aktivitas wisata pendakian dengan wajah baru pascagempa.
4. *Sport Tourisme* Rinjani dengan melakukan even tahunan *Sport Tourisme* (lari dan sepeda gunung) tingkat nasional dan internasional di kawasan TNGR.
5. *The 13th SeaBRnet* dimana Cagar Biosfer Rinjani-Lombok menjadi tuan rumah even Internasional Cagar Biosfer.

Kegiatan Rinjani Meriri periode Januari sampai dengan Maret 2020, hal-hal yang sudah dan akan dilakukan adalah:

1. Survei 4 jalur pendakian resmi;
2. Survei 2 jalur baru (Torean dan Tetebatu);
3. Penataan dan perbaikan jalur pendakian;
4. *Upgrade e*-Rinjani;
5. Fasilitasi Kelembagaan Forum *Trekking Organizer* (TO) dan Forum Porter Guide Rinjani;
6. Evaluasi Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA); dan

7. Evaluasi pendakian, SOP, konsep wisata Rinjani, dan rencana pembukaan jalur:
   a. Pelayanan di pintu pendakian (rehab dan penataan).
   b. Pengelolaan sampah pascapendakian.
   c. Integrasi budaya dalam kegiatan pendakian.

Kegiatan Jalan Damai Mengelola Taman Nasional Gunung Rinjani, periode Januari – Maret 2020, dimana hal-hal yang sudah dan akan dilakukan adalah:

1. Penyelesaian tentang pengelolaan Otak Kokoq Joben.
   a. Kerja sama pengelolaan ➔ Nota Kesepahaman antara Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan Bupati Lombok Timur dan PKS antara Kepala Balai dengan Kepala Dinas Pariwisata.
   b. Destinasi wisata terpadu (Destinasi Otak Kokok Joben sebagai satu kesatuan).
   c. Pemungutan tiket bersama satu pintu.
   d. Penyelesaian aset.
   e. Penanganan PKTI hutan Pesugulan.
2. Nota Kesepahaman antara Dirjen KSDAE dan Bupati Lombok Timur.
3. Perjanjian kerja sama kemitraan konservasi pemulihan ekosistem (Kepala Balai dengan Kelompok Masyarakat Desa Bebidas dan Desa Sapit).
4. Pemulihan ekosistem melalui Kelola Ekologi dan Kelola Ekonomi.
5. Pembentukan Satgas Pengendalian Revitalisasi Fungsi Hutan Pesugulan.

Kegiatan Rinjani Begawe yang akan dimulai pada 1 April 2020, melalui kegiatan pembukaan jalur pendakian; peresmian kantor Jebak Gawah; *launching New-e*Rinjani*;* dan pesta adat: Sembek, Gasing, Peresaian, Gendang Belek, dan beberapa tarian tradisional; *talkshow*: Pendakian Aman dan Nyaman dan *Save* Elang Flores; bazar/pasar kuliner, kerajinan, kopi dan produk kelompok binaan; musik dan kesenian tradisional; panen morel (jamur termahal nomor dua dunia); dan lomba foto: *Trekking Rinjani & Biodiversity*.

Kemudian *Sport Tourisme* Rinjani, dengan kegiatan Rinjani 100 (lomba lari), merupakan even tahunan Lari Gunung Internasional (tahun 2020 merupakan penyelenggaraan ke IV), dengan waktu pelaksanaan 26-28 Juni 2020; nomor yang dilombakan yaitu 117 km, 60 km, 36 km dan 27 km, dimana jumlah pendaftar untuk *race* tahun 2020 sebanyak 1.050 orang dari 27 negara, Malaysia (197 org). Pada tahun 2017 dan 2018 ada lomba lari menuju bukit Pegasingan khusus untuk porter;

Tahun 2018 kategori 100 km juaranya pelari Thailand, dimana tahun 2018 pendaki banyak dari Thailand. Selain itu juga melakukan kegiatan Rinjani *Enduro Challenger* (even sepeda gunung); yaitu even sepeda gunung tingkat nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2016.

Adapun kegiatan dilaksanakan di jalur sepeda gunung yang telah ditetapkan dengan rute kawasan TNGR Sembalun. Even ini merupakan even unggulan yang didukung oleh Pemkab. Lombok Timur. Kemudian yang terakhir adalah *The 13th SeaBRnet* 2020, dengan waktu pelaksanaan tanggal 6-8 Juni 2020. Kegiatan ini merupakan pertemuan ke 13 anggota Cagar Biosfer Asean dimana Cagar Biosfer Rinjani Lombok menjadi tuan rumah. Jumlah peserta ± 150 orang dari 11 negara di ASEAN dan Asia serta anggota Cagar Biosfer di Indonesia. Kegiatan lainnya adalah pameran produk dan potensi dan *Field Trip* di kawasan konservasi (TNGR dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Beberapa hasil pertemuan di lapangan:

1. Pada tahun 2017 pendaki mencapai 93 ribu, menurun sejak gempa tahun 2018, sehingga perlu perbaikan jalur pendaki.
2. Pengelola TNGR mengeluhkan sampah yang masih menjadi masalah pada tahun 2017, sampah yang mampu diturunkan dari atas sekitar 13 ton sampah.
3. Para porter merasa terganggu dengan adanya wacana pembangunan kereta gantung di TNGR.
4. Perlu adanya perbaikan jalur pendakian sebelum dibuka kembali pendakian.
5. Perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan para pekerja TNGR.
6. Perlu memperhatikan kelestarian TNGR sebelumnya terdapat 240 mata air saat ini tinggal 110 mata air.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI tidak setuju dengan adanya rencana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menambah SDM TNGR.
3. Komisi IV DPR RI mendorong petugas TNGR untuk melarang pendaki membawa botol plastik.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pengelola TNGR untuk aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
5. Komisi IV DPR RI mendorong pentingnya BPJS untuk para porter dan guide.

6. Komisi IV DPR RI meminta memperbanyak fasilitas pemadam kebakaran.

G.3. Pengembangan Kawasan Bawang Putih Sembalun

Pengembangan kawasan bawang putih secara umum tidak terlepas dari fasilitasi bantuan oleh APBN, penanaman oleh pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), dan swadaya oleh masyarakat. Peningkatan kawasan bawang putih signifikan terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Data Luas Tanam APBN, RIPH, dan Swadaya Bawang Putih

Kabupaten/Kota	2017			2018			2019		
	APBN (Ha)	RIPH (Ha)	Swadaya (Ha)	APBN (Ha)	RIPH (Ha)	Swadaya (Ha)	APBN (Ha)	RIPH (Ha)	Swadaya (Ha)
Kab. Lombok Timur	50	298	-	100	608	6	1.300	87	66

Sumber: BPS diolah, *) angka sementara.

Pada tahun 2020, lokasi pengembangan kawasan bawang putih yang difasilitasi APBN harus dipisahkan dengan lokasi penanaman bawang putih oleh pelaku usaha yang mendapatkan RIPH minimal di tingkat Kecamatan. Point tersebut akan ditindaklanjuti oleh seluruh Dinas di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur. Berikut beberapa perusahaan yang secara konsisten bermitra dengan petani Lombok Timur.

Tabel Data Penanaman oleh Pelaku Usaha yang Mendapatkan RIPH

NO	NAMA PERUSAHAAN	PERIODE RIPH	TAHUN TANAM	Lokasi		Luas Tanam (ha)
				Desa	Kecamatan	
1	AGRA GARLICA LESTARI	2017	2017	Sajang	Sembalun	13
			2018	Sajang	Sembalun	12
			2018	Sajang	Sembalun	18,5
			2018	Sajang	Sembalun	18,41
			2018	Sajang	Sembalun	71,6
			2018	Sajang	Sembalun	12
			2018	Sajang	Sembalun	10,59
		2018	2018	Sajang	Sembalun	25
			2018	Sajang	Sembalun	38,7
			2018	Sajang	Sembalun	7
			2018	Sajang	Sembalun	8,3
			2018	Sajang	Sembalun	10
			2018	Sajang	Sembalun	8,01
			2018	Sajang	Sembalun	24,36
			2018	Sajang	Sembalun	3,73
			2018	Sajang	Sembalun	0,51
			2018	Sajang	Sembalun	3,8

2	AMAN BUANA PUTERA	2017	2018	Sajang	Sembalun	7,6
			2018	Sajang	Sembalun	0,6
			2018	Sajang	Sembalun	5
3	BUANA TUNAS SEGARA SUBUR	2017	2017	Sembalun Lawang	Sembalun	16,83
			2017	Sembalun Bumbung	Sembalun	4,95
4	CAHAYA CIPTA UTAMA	2018	2018	Sembalun	Sembalun	1,4
			2018	Dapur Belik	Sembalun	0,7
5	CITRA SENTOSA	2017	2018	Sembalun	Sembalun	8
			2018	Sembalun	Sembalun	9
		2018	2018	Sembalun	Sembalun	12
			2018	Sembalun	Sembalun	16
			2018	Sembalun	Sembalun	10
			2019	Sembalun	Sembalun	10
			2019	Sembalun Lawang	Sembalun	16
			2018	Sembalun Lawang	Sembalun	12
6	JAKARTA SEREAL	2017	2018	Lendang Luar	Sembalun	0,79
			2018	Lendang Luar	Sembalun	0,21
			2018	Sembalun Lawang	Sembalun	0,3
7	MAHKOTA ABADI PRIMA JAYA	2017	2017	Sembalun Lawang, Sembalun Bumbung	Sembalun	28,56
8	MAJU MAKMUR JAYA KURNIA	2018	2018	Telaga	Sembalun	5
9	PERTANI (PERSERO)	2017	2017	Sembalun Lawang	Sembalun	182
			2018	Sembalun Lawang	Sembalun	68
			2018	Sembalun Lawang	Sembalun	20
			2018	Sembalun Lawang	Sembalun	37,82
			2018	Sembalun Timba	Sembalun	3,41
			2018	Sembalun Bumbung	Sembalun	19,49
			2018	Sembalun	Sembalun	5,34
			2018	Pengadangan	Pringgasela	7,3
			2018	Sapit	Suela	1,4
			2018	Lendang Nangka Utara	Masbagik	0,55
10	PRIMA NUSA LENTERA AGUNG	2017	2017	Lauk Rura	Sembalun	24,57
11	SEGAR CAHAYA INTERNASIONAL	2017	2017	Sembalun Bumbung	Sembalun	27
12	SUMBER ANUGERAH SEJATI	2017	2018	Sembalun	Sembalun	6
13	SURYA ANUGERAH	2018	2018	Sembalun	Sembalun	11,7
			2019	Mekarasari	Suela	15
			2019	Sapit	Suela	15
14	PERWIRA FAJAR BTARI	2018	2018	Timba Gading	Sembalun	41,09
15	SETIA PESONA INDOAGRO	2019	2019	Sembalun Lawang	Sembalun	31,5
16	AGRONIAGA BUMI MANDIRI	2019	2018	Sajang	Sembalun	25

Sumber: Dit. STO.

Dalam beberapa tahun terakhir APBN untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura khususnya pengembangan kawasan bawang putih telah rutin digelontorkan ke Kabupaten Lombok Timur. Berikut rekapitulasi alokasi APBN tahun 2017-2020 di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel Rekapitulasi Anggaran APBN Kab. Lombok Timur TA. 2017-2020

NO	KOMODITAS	2017			2018			2019			2020		
		VOLUME		TOTAL DANA (Ribu)	VOLUME		TOTAL DANA (Ribu)	VOLUME		TOTAL DANA (Ribu)	VOLUME		TOTAL DANA (Ribu)
1	Bawang Merah	200	Ha	8.000.000	80	Ha	3.200.000	50	Ha	950.000			
2	Bawang Putih	1.825	Ha	38.147.500	1.642	Ha	64.463.000	500	Ha	6.500.000	600	Ha	12.500.000
3	Aneka Cabai	375	Ha	11.490.000	175	Ha	5.206.250	150	Ha	1.950.000			
4	Jeruk	25	Ha	375.000	25	Ha	337.500	30	Ha	400.500			
5	Durian										100	Ha	800.000
6	Perbenihan			82.604.500			3.400.000						
7	Pascapanen			816.000			220.000			590.000			75.000
8	Dukungan Manajemen			145.000			105.000			105.000			105.000
9	Penerapan GAP									39.261			
	TOTAL	**2.425**	**Ha**	**141.578.000**	**1.922**	**Ha**	**76.931.750**	**730**	**Ha**	**10.534.761**	**700**	**Ha**	**13.480.000**

Sumber: RKA-KL DIPA

Upaya pengembangan kawasan bawang putih tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah namun juga melibatkan peran BUMN, yaitu PT Pertani (Persero) yang telah melakukan pembinaan kepada petani bawang putih sejak tahun 2017, sebagaimana tabel di bawah ini:

DATA AREAL PERTANAMAN BAWANG PUTIH BINAAN PT PERTANI (PERSERO)

I. PROPINSI NTB

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi	Luas (Ha)	Jadwal Tanam	Jadwal Panen	Keterangan
TAHUN 2017						
1	Sembalun Horti 441	Desa Sembalun lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Prov. NTB	182.00	Juli - Agustus 2017	Nopember - Desember 2017	Wajib Tanam PT Pertani
2	So Sipi	Desa Sambori, Kec. Lambitu, Kab. Bima, Prov. NTB	80.00	Juni 2017	Oktober 2017	Wajib Tanam PT Pertani
	JUMLAH		**262.00**			
TAHUN 2018						
1	Sembalun Horti 441	Desa Sembalun lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Prov. NTB	68.00	Februari - Maret 2018	Juni - Juli 2018	Wajib Tanam PT Pertani
2	Sembalun Horti 441	Desa Sembalun lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Prov. NTB	95.30	Ápril 2018	Agustus 2018	Wajib Tanam PT Pertani
3	So Sipi	Desa Sambori, Kec. Lambitu, Kab. Bima, Prov. NTB	321.70	Mei - Juli 2018	September - Nopember 2018	Wajib Tanam PT Pertani
	JUMLAH		**485.00**			
TAHUN 2019						
1	So sipi	Ds. Sambori, Kec. Lambitu, Kab. Bima	291.00	Juni 2019	Oktober 2019	Wajib Tanam Mitra
2	Sembalun Horti 441	Desa Sembalun lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Prov. NTB	21.00	Juni 2019	Oktober 2019	Penangkaran Benih
	JUMLAH		**312.00**			
TOTAL TAHUN 2017 - 2019			**1,059.00**			

Pada kegiatan di Sembalun ini, selain melakukan pertemuan dan diskusi, Tim Komisi IV DPR RI mengunjungi 2 (dua) lokasi pengembangan kawasan bawang putih, yaitu lokasi kegiatan APBN kawasan bawang putih intensifikasi dan lokasi wajib tanam importir penerima RIPH**. Lokasi pertama**, merupakan kawasan yang dikelola oleh kelompok binaan PB Horsela yang terletak di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun menggunakan varietas Sangga Sembalun dengan luas lahan 50 ha.

Pada saat peninjauan terungkap bahwa penanganan pascapanen merupakan hal yang sangat dibutuhkan serta masalah terkait pembiayaan dimana KUR hanya diberikan pada 1 (satu) musim saja. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah terkait penyerapan hasil panen bawang putih. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan ujicoba penugasan kepada Perum Bulog untuk menyerap hasil bawang putih.

Lokasi kedua, merupakan lokasi wajib tanam 5% milik PT Lintas Buana Unggul seluas 241 ha yang bermitra dengan Kelompok Tani Baru Mekar, dengan periode tanam bulan November 2019 hingga Juni 2020. Disampaikan bahwa bibit berasal dari poktan dengan skema kemitraan, dan perusahaan memfasilitasi sarana prasarana seperti mulsa, saprodi. Secara langsung Tim Komisi IV DPR RI meminta agar dalam menjelaskan biaya produksi maupun hasil tidak berdasarkan asumsi. Disamping itu, meminta agar menghitung luas lahan, jangan ada manipulasi data. Selanjutnya meminta agar pelaksanaan wajib tanam sesuai dengan kewajiban dan petani mendapatkan keuntungan. Selain itu, meminta kepada seluruh pelaku usaha budi daya agar menggunakan benih yang berlabel dan bekualitas tinggi, serta tersertifikasi yang dihasilkan oleh penangkar atau benih lokal. Kemudian meminta kepada Pemerintah untuk mempermudah izin dan proses sertifikasi benih hasil penangkaran petani.

Selanjutnya diperoleh informasi bahwa pengadaan tahun 2018 bermasalah, dimana terdapat temuan pelanggaran terkait pengadaan bibit dan bangsal pascapanen. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah segera menyelesaikan temuan tersebut. Terkait bantuan benih APBN untuk kelompok Tahun Anggaran 2018 sebanyak 1200 ton, hanya terserap sebesar 900,5 ton. Adapun untuk Tahun Anggaran 2019 kegiatan pengembangan kawasan bawang putih seluas 500 ha berkaitan dengan bantuan non benih seperti pupuk dan mulsa, untuk Tahun

Anggaran 2020 diperoleh informasi bantuan sebesar 100 ha untuk benih dan 500 ha untuk prasarana dan sarana pertanian.

Kunjungan lapangan dilanjutkan dengan pertemuan dan diskusi dengan beberapa poin yang dihasilkan, yaitu:

1. Permodalan merupakan kendala utama dikarenakan kemampuan finansial petani yang sangat terbatas. Dari tahun ke tahun modal yang dibutuhkan untuk budi daya bawang putih semakin meningkat terutama untuk pembelian benih, pupuk, dan pestisida yang semakin mahal. Oleh karena itu, bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu dimaksimalkan khususnya untuk penangkar bawang putih. Target serapan KUR untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bidang hortikultura adalah senilai Rp623.513.000.000,00 yang diharapkan mampu mendorong sektor produksi, khususnya komoditas bawang putih di Kabupaten Lombok Timur.
2. Belum adanya kemitraan dengan perusahaan atau dengan mitra lainnya sehingga produksi selama ini hanya diserap untuk pasar lokal atau pemenuhan kebutuhan benih.
3. Fluktuasi harga yang sangat tinggi terutama pada saat panen raya dimana bawang putih impor masuk sehingga harga bisa turun sampai titik terendah (Rp3.000,00 - Rp4.000,00/kg basah) sehingga petani tidak balik modal. Berdasarkan analisa usaha tani yang telah disusun Ditjen Hortikultura, *Break Even Point* (BEP) untuk bawang putih adalah senilai Rp9.179,00 apabila dilakukan penanaman pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan maka BEP lebih tinggi senilai Rp10.995,00.
4. Kondisi gudang penyimpanan produksi yang kurang memadai. Selama ini petani menyimpan hasil panen di langit-langit rumah yang diberikan para-para atau bahkan hanya diletakkan di teras rumah.
5. Ada petani yang mendapat benih tidak sesuai dengan berita acara, benih diberikan setelah berita acara ditandatangani, serta ada yang mendapatkan benih tetapi tidak mendapatkan pupuk.
6. Petani mengeluhkan realisasi program pada tahun 2018 tidak lebih dari 60% padahal bantuan sekitar Rp60 miliar lebih.
7. Asumsi apabila benih 985 ton harus bisa menghasilkan minimal 7000 ton benih.

8. Kesulitan petani dengan program Pemerintah, petani harus menyesuaikan dengan program sehingga tidak sesuai dengan musim tanam, seharusnya program yang menyesuaikan dengan musim tanam petani sehingga program Pemerintah bisa berhasil.
9. Kelebihan importir RIPH petani bisa menanam kapanpun sesuai musim tanam dan tidak terbatas.
10. Bawang putih di Sembalun mirip dengan lumbu hijau dan lumbu kuning sehingga hanya seribuan ton yang disertifikasi, sisanya dibawa keluar kemudian diberi label di luar Lombok, kalau tidak dilabel tidak bisa diawasi karena itu masuk konsumsi.
11. Penangkar mengusulkan agar benih yang ditanam adalah benih unggul yang sudah tersertifikasi dan penangkar meminta agar proses sertifikasi dipermudah.
12. Pada tahun 2019 bantuan prasarana mencapai sekitar Rp6,5 miliar untuk 500 ha 2019, sedangkan pada tahun 2020 bantuan prasarana untuk 500 ha dan bantuan benih 100 ha.
13. Wakil Bupati Lombok Timur meminta agar pemberian KUR kepada petani diberikan dalam jangka waktu satu tahun, tidak permusim tanam karena memberatkan petani, karena dengan KUR permusim tanam akan memaksa petani untuk menjual hasil panen tidak sesuai harga karena harus segera melunasi KUR sementara petani masih sulit menjual hasil panen karena minimnya penyerapan pascapanen.
14. Petani mengeluhkan adanya kewajiban melakukan *bundling* pembelian pupuk bersubsidi dengan non-subsidi. Terkait hal ini, PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) yang diwakilkan oleh PT Pupuk Kaltim menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban mengenai hal ini. Oleh karena itu, pihak PIHC akan melakukan penertiban dan memberikan peringatan dari yang paling ringan.
15. Perwakilan dari perbankan, yaitu Bank NTB Syariah menyampaikan salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan bermitra dengan petani bawang putih untuk memfasilitasi pembiayaan.
16. Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Dirjen Hortikultura menyampaikan bahwa meskipun sumber anggaran kegiatan pengembangan bawang putih berasal dari APBN, namun pelaksananya adalah pemerintah daerah setempat,

sehingga jika dalam pelaksanaannya ada temuan maupun pelanggaran, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI meminta Bulog untuk menyerap hasil panen petani bawang putih.
2. Komisi IV DPR RI meminta agar jangan terjadi tumpang tindih lahan antara lahan yang dibiayai APBN dengan lahan pelaksanaan wajib tanam oleh importir.
3. Komisi IV DPR RI meminta perlunya pengawasan ketat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta persediaan pupuk non subsidi sesuai dengan kebutuhan petani.
4. Komisi IV DPR RI mengingatkan bahwa semua benih bawang putih yang ditanam harus bersertifikat.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada petani dan pelaku usaha apabila ada indikasi pelanggaran ataupun penyelewengan harus disertai dengan bukti yang valid.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada pihak perbankan agar memberikan fasilitasi dan kemudahan kepada petani untuk memperoleh pembiayaan.
7. Komisi IV DPR RI meminta agar setiap temuan dan pelanggaran segera diselesaikan dan meminta agar tidak ada manipulasi data, antara lain data luas lahan, luas lahan wajib tanam, hingga data produksi bawang putih.

G.4. Peninjauan Gudang Bulog

Pada saat kunjungan ke Gudang Bulog, diketahui bahwa terdapat lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tepat bersebelahan dengan lokasi gudang, dimana bau yang berasal dari timbunan sampah sudah menggangu dan dapat mempengaruhi kualitas beras yang disimpan di dalam gudang, serta menimbulkan penyakit. Timbunan sampah terjadi karena terjadi ketidakseimbangan antara sampah yang dibuang dengan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini dinilai oleh Komisi IV DPR RI telah melanggar peraturan karena lokasi TPS juga berada di sekitar pemukiman. Disampaikan oleh pihak Bulog, bahwa telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah mengenai permasalahan tersebut agar TPS direlokasi, namun hingga saat kunjungan Komisi IV DPR RI belum mendapatkan respon positif.

Hal ini harus segera diatasi, karena bulan April nanti sudah mulai masuk masa panen, namun apabila TPS belum direlokasi, maka Perum Bulog tidak akan menyerap dan menyimpan beras di gudang Sweta, karena melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengenai ketentuan jaminan keamanan pangan. Perum Bulog menyampaikan arahan Dirut Perum Bulog, bahwa apabila hingga surat yang terakhir tidak ditanggapi, maka pihak Perum Bulog akan memidanakan Pemerintah Kota Mataram. Pada kesempatan yang sama, pihak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal diantaranya menggunakan incerator, yang asap hasil pembakarannya diprotes oleh warga sekitar. Alternatif lain yang akan dicoba adalah membangun atap. Secara langsung Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa relokasi merupakan hal yang mutlak dilakukan dengan segera karena lokasi TPS tidak boleh bersebelahan dengan lokasi penyimpanan bahan pangan. Selain itu, menyampaikan kemungkinan untuk dihentikannya alokasi DAK apabila pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram tidak dapat bekerja sama dengan baik.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Kota Mataram untuk segera merelokasi sampah tersebut dan memindahkan lokasi pengolahan sampah serta meminta kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mencarikan solusi.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk membangun Bank Sampah di setiap Kelurahan yang dapat dikelola oleh BUMDes dan dapat diolah menjadi pupuk organik.

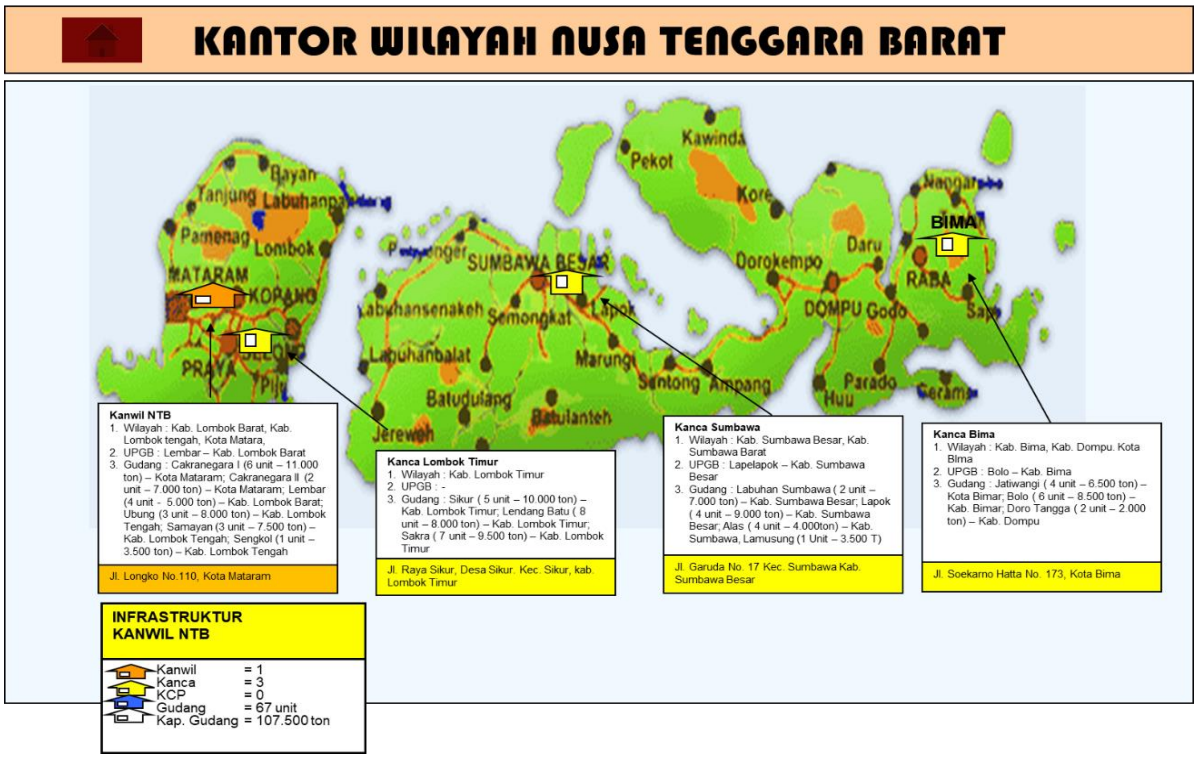

Realisasi Pengadaan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat

(ton)

No	Kanwil / Kacab	2019			2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	DIVRE N.T.B	49.296	33.600	68%	27.918	2	0%
2	SUBDIVRE SUMBAWA-NTB	43.843	25.908	59%	20.394	145	1%
3	SUBDIVRE BIMA - NTB	27.637	10.887	39%	27.342	208	1%
4	SUBDIVRE LOMBOK TIMUR - NTB	20.881	5.007	24%	14.346	257	2%
JUMLAH		141.657	75.401	53%	90.000	611	1%

*) per Tanggal 20 Februari 2020.

Penyaluran BPNT Wilayah Tahun 2020 Nusa Tenggara Barat

NO	KANWIL	KOMODITI	PENJUALAN BPNT 01 JAN SD 20 FEB 2020				TOTAL PENJUALAN BPNT	
			Melalui RPK, E-Warong dan Agen		Melalui Distributor			
			Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp
1	NUSA TENGGARA BARAT	BERAS	772.732	7.555.725.550	27.170	233.219.000	799.902	7.788.944.550
		TELUR	-	-	-	-	-	-

Sumber data : aplikasi penjualan Langsung dan SIL

Posisi Persediaan Beras CBP Wilayah NTB

KANWIL/ KANCA	STOK CBP (ton)
N.T.B.	**50.672**
Kanwil NTB	**24.948**
Kanca Sumbawa	**16.462**
Kanca Bima	**7.882**
Kanca Lombok Timur	**1.380**

*) per Tanggal 20 Februari 2020.

G.5. Peninjauan Gudang Pupuk

ALOKASI VS REALISASI PUPUK SUBSIDI PROVINSI NTB
s.d. 27 FEBRUARI 2020

NO.	JENIS PUPUK	ALOKASI		REALISASI s.d. 27 FEBRUARI 2020	%	%
		2020	s.d. FEBRUARI			
	1	2	3	4	5 [4:2]	5 [4:3]
1	ZA	29.718	5.349	5.045	17	94
2	SP-36	15.632	2.814	3.521	23	125
3	PHONSKA	120.432	21.678	17.571	15	81
4	PETROGANIK	35.011	6.302	1.254	4	20
	JUMLAH	200.793	36.143	27.391	14	76

Pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat, sehingga ketersediaan pupuk pada musim tanam harus menjadi perhatian serius. Komisi IV DPR RI mengunjungi Gudang Pupuk di Cemara, Nusa Tenggara Barat untuk memastikan kesiapan PIHC dalam menyediakan pupuk. Pada saat kunjungan terdapat beberapa hal, yaitu:

1. Meskipun alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun secara agregat untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan sebanyak 5%.

2. Hingga bulan Februari 2020, penyerapan pupuk bersubsidi mencapai angka 32%, yang mana apabila penyaluran menggunakan pola yang sama, maka persediaan pupuk bersubsidi pada bulan Juni 2020 akan habis.
3. Upaya penambahan volume pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menaikkan nilai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berdampak terhadap penghematan dimana nilai penghematan tersebut bisa digunakan untuk penambahan volume pupuk bersubsidi.
4. Salah satu upaya untuk antisipasinya adalah, pihak PIHC akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi atau penambahan.
5. PIHC telah menyediakan pupuk non-subsidi untuk mengantisipasi kurangnya pupuk bersubsidi dan untuk petani yang tidak termasuk ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
6. Berkaitan dengan pelaksanaan Kartu Tani, dijelaskan bahwa program tersebut dalam pelaksanaannya sangat sulit dilaksanakan, dikarenakan tidak semua lokasi memiliki jaringan internet yang baik. Akibatnya belum ada pembelian pupuk bersubsidi yang menggunakan Kartu Tani.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

1. Komisi IV DPR RI meminta PIHC untuk mengawasi adanya informasi mengenai pembelian pupuk bersubsidi, petani juga diwajibkan membeli pupuk non subsidi. Selanjutnya meminta PIHC agar membuat surat himbauan atau pengumuman di setiap kios pupuk bahwa petani pemilik RDKK tidak wajib membeli pupuk non-subsidi.
2. Pelaksanan Kartu Tani seharusnya dilakukan dengan proyek percontohan di wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur yang mendukung. Selain itu, dalam melakukan sosialiasi atau rapat koordinasi seharusnya melibatkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT PLN (Persero) untuk mengetahui apakah titik/lokus yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan Kartu Tani telah sesuai dan memiliki infrastruktur yang mendukung.

G.6. Peninjauan Pabrik Pengolahan Benih PT Sang Hyang Seri (Persero)

Pada kunjungan ini, Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi bahwa pabrik pengolahan ini memiliki kapasitas produksi 3 ton per jam, dimana jika pada saat musim panen beroperasi selama 10 jam, untuk mengolah jagung dan padi.

Selain mesin, juga memiliki lantai jemur yang mampu menjemur hingga 60 ton. Saat ini PT SHS sedang mengejar produksi untuk e-katalog. Adapun pabrik ini dibangun tahun 2018 dan serah terima di tahun 2019.

Komisi IV DPR RI mengusulkan agar ke depan PT SHS tidak hanya mengelola padi namun juga jagung, antara lain jagung impor untuk pakan. Selain itu, berharap agar terdapat sinergitas antara penangkar dengan PT SHS, dimana PT SHS melibatkan masyarakat di sekitar pabrik, yaitu di Selebung. Komisi IV DPR RI mengapresiasi adanya pabrik pengolahan yang dapat menghasilkan benih yang lebih terjamin. Untuk itu, meminta agar Pemerintah dapat bekerja sama dengan PT SHS dalam rangka pemenuhan benih nasional.

H. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sinkronisasi APBN dan APBD agar dalam penyusunan rencana kerja terintegrasi sesuai kebutuhan dari Pusat hingga Daerah.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan dikembangkan berdasarkan zona atau klasterisasi mengacu kepada komoditas/produk unggulan strategis setiap wilayah, dimana dalam pengembangannya dapat dimulai dengan *pilot project* (demplot).
4. Komisi IV DPR RI mendukung upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sentra lobster nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta maupun melibatkan investor antara lain dalam transfer teknologi, namun juga mengingatkan agar hubungan kerja sama yang terjadi harus saling menguntungkan dan tidak merugikan masyarakat, sehingga pembudi daya lobster lokal dapat menjadi ‘tuan’ di daerahnya sendiri.

6. Komisi IV DPR RI meminta kepada BUMN untuk menyerap hasil perikanan maupun garam yang tidak terserap oleh pasar serta meminta kepada BKIPM untuk menjaga agar tidak terjadi penyelundupan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan percepatan pembangunan kehutanan yang berbasis pada peran serta masyarakat menuju kesejahteraan yang berkeadilan.
8. Komisi IV DPR RI meminta agar memperhatikan keseimbangan ekosistem dan tidak merusak lingkungan dalam pengembangan wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani untuk aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
9. Komisi IV DPR RI meminta agar setiap temuan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan bawang putih segera diselesaikan dan meminta agar tidak ada manipulasi data, antara lain data luas lahan, luas lahan wajib tanam, hingga data produksi bawang putih.
10. Komisi IV DPR RI mendorong lahirnya penangkar-penangkar baru yang tersertifikasi, gudang-gudang milik swasta ataupun swadaya, penambahan insfrastruktur irigasi, serta areal pertanaman yang terus bertambah dalam rangka pengembangan kawasan bawang putih guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
11. Komisi IV DPR RI meminta Bulog untuk menyerap hasil panen petani bawang putih, dengan mengusulkan ujicoba penugasan kepada Bulog.
12. Komisi IV DPR RI memintah Pemerintah Kota Mataram dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan masalah pengolahan sampah yang berada di belakang Gudang Bulog Sweta karena bau yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah sangat mengganggu dan dapat mempengaruhi kualitas beras yang disimpan di Gudang Bulog.
13. Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Bulog dapat menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang stabil terutama untuk komoditas beras, minyak, gula, dan tepung terigu.

14. Komisi IV DPR RI meminta perlunya pengawasan ketat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta persediaan pupuk non subsidi sesuai dengan kebutuhan petani.
15. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk menambah volume pupuk bersubsidi dalam rangka pemenuhan ketersediaan pupuk bagi petani.
16. Komisi IV mengusulkan agar ke depan PT SHS tidak hanya mengelola padi namun juga jagung, antara lain jagung impor untuk pakan. Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta agar PT SHS meningkatkan sinergitas antara penangkar dengan PT SHS, dengan melibatkan masyarakat di sekitar pabrik, yaitu di Selebung.
17. Komisi IV DPR RI meminta kepada BUMN Pangan serta PIHC meningkatkan peran dan bersinergi dengan petani, nelayan, maupun petambak garam dalam rangka peningkatan produksi, penyerapan hasil pertanian, dan ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.
18. Komisi IV DPR RI menerima masukan dan saran dan akan mendorong program-program yang dapat mengembangkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

I. PENUTUP

Terhadap beberapa masukan aspirasi dari mitra kerja/pemerintah daerah dan tanggapan dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menindaklanjuti dengan menyampaikan, baik pada saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Beberapa program pembangunan yang diusulkan langsung dan/atau tertulis oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah selama kunjungan kerja ini agar dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, khususnya dalam APBN Tahun 2020.

Jakarta, Maret 2020

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

LAMPIRAN

DATA ADMINISTRASI PKT KP PROVINSI NTB

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS WILAYAH (km2)	KECAMATAN	KEL/ DESA	DISTRIBUTOR	PENGECER	ALOKASI 2020 (ton)
1	Mataram	61,30	6	50	2	10	824,00
2	Lombok Barat	1.053,87	10	122	3	76	7.165,00
3	Lombok Utara	809,53	5	33	2	34	3.962,00
4	Lombok Tengah	1.208,40	12	139	3	193	20.045,00
5	Lombok Timur	1.605,55	21	254	8	352	33.872,00
6	Sumbawa	6.643,98	24	166	5	222	39.546,00
7	Sumbawa Barat	1.849,02	8	65	1	37	7.455,00
8	Dompu	2.324,60	8	81	4	92	19.167,00
9	Kota Bima	207,50	5	38	2	44	1.872,00
10	Kabupaten Bima	4.389,40	18	191	6	360	35.262,00
	JUMLAH	**20.153,15**	**117**	**1.139**	**29 Distributor**	**1.420**	**169.170,00**

KOMPARASI ALOKASI PUPUK UREA SUBSIDI PROVINSI NTB TAHUN 2019 DAN 2020

KAB /KOTA	ALOKASI		KAB /KOTA	ALOKASI
Mataram	1.222,00		Mataram	824,00
Lombok Barat	10.610,00		Lombok Barat	7.165,00
Lombok Utara	4.777,00		Lombok Utara	3.962,00
Lombok Tengah	24.911,00		Lombok Tengah	20.045,00
Lombok Timur	31.625,00	**4,92%**	Lombok Timur	33.872,00
Sumbawa	30.852,00		Sumbawa	39.546,00
Sumbawa Barat	4.158,00		Sumbawa Barat	7.455,00
Dompu	18.397,00		Dompu	19.167,00
Kota Bima	2.773,00		Kota Bima	1.872,00
Kabupaten Bima	31.909,00		Kabupaten Bima	35.262,00
TOTAL	**161.234,00**		**TOTAL**	**169.170,00**

ALOKASI VS REALISASI PUPUK UREA SUBSIDI PROVINSI NTB s.d. 27 FEBRUARI 2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI		REALISASI s.d. 27 PEB 2020	SISA ALOKASI	%	
		2020	s.d. FEB 2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5:3)	(8=5:4)
1	Mataram	824,00	148,00	262,15	561,85	31,81	177,13
2	Lombok Barat	7.165,00	1.289,00	3.073,85	4.091,15	42,90	238,47
3	Lombok Utara	3.962,00	714,00	2.225,00	1.737,00	56,16	311,62
4	Lombok Tengah	20.045,00	5.549,00	8.640,00	11.405,00	43,10	155,70
5	Lombok Timur	33.872,00	6.097,00	8.601,00	25.271,00	25,39	141,07
6	Sumbawa	39.546,00	7.119,00	12.760,50	26.785,50	32,27	179,25
7	Sumbawa Barat	7.455,00	1.342,00	1.880,00	5.575,00	25,22	140,09
8	Dompu	19.167,00	3.450,06	7.269,00	11.898,00	37,92	210,69
9	Kota Bima	1.872,00	337,00	1.419,35	452,65	75,82	421,17
10	Kabupaten Bima	35.262,00	6.347,00	13.662,15	21.599,85	38,74	215,25
TOTAL NTB		**169.170,00**	**32.392,06**	**59.793,00**	**109.377,00**	**35,34**	**184,59**

ALOKASI VS REALISASI PUPUK ZA SUBSIDI PROVINSI NTB s.d. 27 FEBRUARI 2020

NO.	KABUPATEN	ALOKASI		REALISASI 27 FEBRUARI 2020	%	%
		2020	s.d. FEBRUARI			
	1	2	3	4	5 [4:2]	5 [4:3]
1	Lombok Barat	736	132	95	13	72
2	Lombok Utara	782	140	233	30	166
3	Kota Mataram	4	2	-	-	-
4	Lombok Tengah	2.460	443	425	17	96
5	Lombok Timur	5.471	985	1.010	18	103
6	Sumbawa	8.779	1.580	1.692	19	107
7	Sumbawa Barat	628	113	10	2	9
8	Dompu	4.285	771	481	11	62
9	Bima	6.394	1.151	1.049	16	91
10	Kota Bima	179	32	50	28	156
TOTAL		**29.718**	**5.349**	**5.045**	**17**	**94**

ALOKASI VS REALISASI PUPUK SP-36 SUBSIDI PROVINSI NTB s.d. 27 FEBRUARI 2020

NO.	KABUPATEN	ALOKASI		REALISASI 27 FEBRUARI 2020	%	%
		2020	s.d. FEBRUARI			
	1	2	3	4	5 [4:2]	5 [4:3]
1	Lombok Barat	914	165	247	27	150
2	Lombok Utara	501	90	105	21	117
3	Kota Mataram	100	18	35	35	194
4	Lombok Tengah	2.587	466	1.625	63	349
5	Lombok Timur	3.864	696	785	20	113
6	Sumbawa	2.747	494	209	8	42
7	Sumbawa Barat	409	73	10	2	14
8	Dompu	2.188	394	190	9	48
9	Bima	2.224	400	282	13	71
10	Kota Bima	98	18	33	34	183
TOTAL		**15.632**	**2.814**	**3.521**	**23**	**125**

ALOKASI VS REALISASI PUPUK NPK PHONSKA SUBSIDI PROVINSI NTB s.d. 27 FEBRUARI 2020

NO	KABUPATEN	ALOKASI		REALISASI 27 FEBRUARI 2020	%	%
		2020	s.d. FEBRUARI			
	1	2	3	4	5 [4:2]	5 [4:3]
1	Lombok Barat	4.706	847	681	14	80
2	Lombok Utara	3.581	644	930	26	144
3	Kota Mataram	430	77	102	24	132
4	Lombok Tengah	10.989	1.978	2.735	25	138
5	Lombok Timur	22.704	4.086	2.315	10	57
6	Sumbawa	34.116	6.141	5.836	17	95
7	Sumbawa Barat	5.552	999	490	9	49
8	Dompu	17.152	3.087	1.826	11	59
9	Bima	19.482	3.509	2.246	12	64
10	Kota Bima	1.720	310	410	24	132
TOTAL		**120.432**	**21.678**	**17.571**	**15**	**81**

ALOKASI VS REALISASI PUPUK PETROGANIK SUBSIDI PROVINSI NTB s.d. 27 FEBRUARI 2020

NO.	KABUPATEN	ALOKASI		REALISASI 27 FEBRUARI 2020	%	%
		2020	s.d. FEBRUARI			
	1	2	3	4	5 [4:2]	5 [4:3]
1	Lombok Barat	924	166	40	4	24
2	Lombok Utara	1.366	246	194	14	79
3	Kota Mataram	53	9	-	-	-
4	Lombok Tengah	2.802	504	330	12	65
5	Lombok Timur	10.684	1.923	420	4	22
6	Sumbawa	6.901	1.242	190	3	15
7	Sumbawa Barat	612	110	-	-	-
8	Dompu	5.253	945	-	-	-
9	Bima	5.959	1.073	70	1	7
10	Kota Bima	457	84	10	2	12
TOTAL		**35.011**	**6.302**	**1.254**	**4**	**20**

ALOKASI PUPUK UREA SUBSIDI PROVINSI NTB TAHUN 2020

KAB/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
Mataram	82,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	74,00	824,00
Lombok Barat	716,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	646,00	646,00	7.165,00
Lombok Utara	397,00	317,00	318,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	356,00	355,00	3.962,00
Lombok Tengah	3.254,00	2.295,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.025,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.804,00	1.801,00	20.045,00
Lombok Timur	3.387,00	2.710,00	2.710,00	2.711,00	2.705,00	2.711,00	2.711,00	2.711,00	2.711,00	2.711,00	3.048,00	3.046,00	33.872,00
Sumbawa	3.955,00	3.164,00	3.163,00	3.163,00	3.168,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00	3.559,00	3.559,00	39.546,00
Sumbawa Barat	746,00	596,00	596,00	596,00	599,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	671,00	671,00	7.455,00
Dompu	1.916,70	1.533,36	1.533,36	1.533,36	1.533,36	1.533,36	1.533,36	1.533,36	1.533,36	1.533,36	1.725,03	1.725,03	19.167,00
Kota Bima	187,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	168,00	167,00	1.872,00
Kab Bima	3.526,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	3.173,00	3.174,00	35.262,00
TOTAL	**18.166,70**	**14.225,36**	**13.280,36**	**12.980,36**	**12.982,36**	**12.955,36**	**13.534,36**	**13.534,36**	**13.534,36**	**13.534,36**	**15.224,03**	**15.218,03**	**169.170,00**

REALISASI PUPUK UREA SUBSIDI PROVINSI NTB
s.d. 27 PEBRUARI 2020

KAB/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	TOTAL
Mataram	192,15	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,15
Lombok Barat	2.089,20	984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,85
Lombok Utara	1.175,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
Lombok Tengah	5.020,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
Lombok Timur	3.984,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,00
Sumbawa	8.340,50	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,50
Sumbawa Barat	1.380,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Dompu	5.257,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00
Kota Bima	1.089,35	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,35
Kabupaten Bima	8.816,00	4.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,15
TOTAL	**37.343,20**	**22.449,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.793,00**

STOK ADM PUPUK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI PKT KP NTB
per 27 FEBRUARI 2020

NO	GUDANG LINI II/III PULAU LOMBOK	KAPA SITAS	SUBSIDI		NON SUBSIDI									
			UREA PRILL	ZEO-GANIK	UREA		NPK					Ecofert		Biodex
					PRILL	GRA-NUL	15-15-15 @50 Kg	16-16-16		20-10-10		@5 Kg	@20 Kg	
								@20 Kg	@50 Kg	@20 Kg	@50 Kg			
A	Lini II Lombok	28.100,000	9.519,500	0,000	351,000	49,950	0,250	138,540	0,750	0,480	6,200	3,295	2,980	0,000
A.1	Lombok Barat	28.100,000	9.519,500	0,000	351,000	49,950	0,250	138,540	0,750	0,480	6,200	3,295	2,980	0,000
1	BGR Lembar	5.600,000	123,600	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	GPP Lembar	5.000,000	1.815,050	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,750	0,480	6,200	0,000	0,000	0,000
3	BGR Serumbung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Puskud Serumbung	6.000,000	2.449,750	0,000	350,800	49,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Serumbung C	6.000,000	2.940,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Serumbung Cemara	5.500,000	2.190,550	0,000	0,000	0,000	0,000	138,540	0,000	0,000	0,000	3,295	2,980	0,000
B	Lini III Lombok	17.925,000	12.105,850	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B.1	Lombok Barat	2.800,000	2.275,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Puskud Bremi	2.800,000	2.275,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B.2	Lombok Utara	2.700,000	1.329,550	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Tanjung	2.700,000	1.329,550	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B.3	Lombok Tengah	5.800,000	4.482,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Puskud Kawo	3.300,000	2.640,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Praya	2.500,000	1.842,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B.4	Lombok Timur	6.625,000	4.019,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Puskud Swangi	3.600,000	1.815,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Aikmel	1.225,000	933,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	BGR Sakra	1.800,000	1.270,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL LOMBOK		46.025,000	21.625,350	0,360	351,000	49,950	0,250	138,540	0,750	0,480	6,200	3,295	2,980	0,000

STOK ADM PUPUK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI PKT KP NTB
per 27 FEBRUARI 2020

NO	GUDANG LINI II/III PULAU SUMBAWA	SUBSIDI			NON SUBSIDI									
		KAPA-SITAS	UREA PRILL	ZEOR-GANIK	UREA		NPK					Ecorfert		Biodex
					PRILL	GRA-NUL	15-15-15	16-16-16		20-10-10		@5 Kg	@20 Kg	
							@50 Kg	@20 Kg	@50 Kg	@20 Kg	@50 Kg			
C	Lini III Sumbawa	19.000,000	9.746,950	5,670	1.113,800	0,000	0,000	178,760	0,000	186,500	297,300	8,950	5,520	0,000
C.1	Sumbawa	9.250,000	4.308,650	0,000	533,300	0,000	0,000	178,760	0,000	73,500	292,050	8,950	5,000	0,000
1	BGR Badas	1.050,000	826,450	0,000	240,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000
2	Bogas	1.700,000	1.618,950	0,000	230,800	0,000	0,000	0,000	0,000	73,500	254,050	3,950	0,000	0,000
3	Utan	1.500,000	1.100,350	0,000	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,000	0,000	0,000	0,000
4	Lape	5.000,000	762,900	0,000	60,000	0,000	0,000	178,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C.2	Dompu	3.200,000	1.931,450	0,920	300,500	0,000	0,000	0,000	0,000	113,000	0,250	0,000	0,520	0,000
1	Puskud Dompu	3.200,000	1.931,450	0,920	300,500	0,000	0,000	0,000	0,000	113,000	0,250	0,000	0,520	0,000
C.3	Kota Bima	2.750,000	1.628,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	BGR Bima	1.050,000	1.033,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Penaraga	1.700,000	595,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C.4	Kabupaten Bima	3.800,000	1.878,000	4,750	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
1	Bolo	3.800,000	1.878,000	4,750	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL SUMBAWA		19.000,000	9.746,950	5,670	1.113,800	0,000	0,000	178,760	0,000	186,500	297,300	8,950	5,520	0,000
TOTAL NTB		65.025,000	31.372,300	6,030	1.464,800	49,950	0,250	317,300	0,750	186,980	303,500	12,245	8,500	0,000

JUMLAH GUDANG = 20 UNIT
UREA SUBSIDI = 31.372,300 TON
UREA NON SUBSID = 1.514,750 TON
NPK NON SUBSIDI = 808,780 TON
ECOFERT NON SUBSIDI = 20,745 TON
BIODEX NON SUBSIDI = 0,000 TON

STOK ADM PUPUK SUBSIDI PKG NTB
per 27 PEBRUARI 2020

NO.	GUDANG PENYANGGA	KAPASITAS	ZA		SP-36		PHONSKA		PETROGANIK	
			STOK	BUFFER	STOK	BUFFER	STOK	BUFFER	STOK	BUFFER
1	Lombok Tengah - NTB (GSG)	2.000	402,40	140	417,45	147	1.520,10	623	82,28	35
2	Lombok Lembar - NTB (VTP)	4.000	611,20	21	215,00	21	687,15	123	11,92	33
3	Lombok Lembar - NTB (GSG)	2.100	289,65	155	104,40	109	1.365,25	643	0,72	30
4	Lombok Pringgabaya – NTB (BGR)	5.000	373,10	21	430,00		1.147,65	123	111,84	33
5	Lombok Serumbung - NTB(BGR)	6.000	308,95	21	24,45	21	1.138,10	123	6,60	33
6	Lombok Timur - NTB (BGR)	1.435	188,70	155	119,20	109	491,55	643	20,36	15
7	Lombok Utara - NTB (GSG)	1.000	70,05	21	48,00	21	181,00	123	27,48	33
8	Sumbawa - NTB (BGR)	5.000	351,80	249	445,60	78	925,30	967	71,67	20
9	Sumbawa II - NTB (GSG)	5.000	369,90	249	409,50	78	1.028,35	967	0,52	31
10	Sumbawa Barat - NTB (GSG)	1.125	16,00	35	28,00	23	70,00	315	8,00	35
11	Lepadi Dompu - NTB (BGR)	1.000	147,00	243	146,00	124	428,70	972	0,80	15
12	Bima - NTB (BGR)	2.000	175,70	373	60,35	132	138,05	1.204	51,08	16
JUMLAH		**35.660**	**3.304,45**	**1.684**	**2.547,95**	**886**	**9.121,20**	**6.827**	**393,27**	**329**

RENCANA PENYEDIAAN BENIH TANAMAN PANGAN
PT SANG HYANG SERI (PERSERO)
TAHUN 2020/2021

No	Komoditas	Penyediaan Benih (Kg)												Jumlah	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Padi Inbrida	-	-	50,000	300,000	250,000	50,000	50,000	300,000	200,000	250,000	500,000	250,000	2,200,000	Kesiapan FM & GM
2	Jagung Hibrida	-	-	-	50,000	100,000	250,000	100,000	50,000	-	-	-	-	550,000	Kesiapan FM & GM
3	Kedelai	-	-	-	50,000	100,000	200,000	150,000	100,000	-	-	-	-	600,000	Kesiapan FM & GM
	Jumlah	-	-	50,000	400,000	450,000	500,000	300,000	450,000	200,000	250,000	500,000	250,000	3,350,000	

Keterangan: Ketersediaan benih diperoleh dari kerja sama penangkaran vendor lokal dan pembenihan bersih/GKP dengan penangkar lokal.

RENCANA PANEN HASIL KERJASAMA AREAL PENANGKARAN BENIH PADI NON HIBRIDA
PT SANG HYANG SERI (PERSERO) CABANG OPERASIONAL NTB
TAHUN 2020/2021

No	Nama Vendor	Pemilik/ Pimpinan Vendor	Alamat Vendor	Nama Kelompok Tani	Alamat Penangkaran	Luas (Ha)	Varietas	Benih (Kg)	Rencana			Perkiraan Hasil Panen
									Tebar	Tanam	Panen	
1	UD. Usaha Tani	Martin Zuhdi	Pengadang	Tunas Barakah	Desa Mertak Tombok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah	25	Inpari 32	625	Des	Jan	Apr	125,000
2	KPB. Tumbuh Bersatu	Jumatra	Sukarare	Ingin Maju	Desa Sukarare Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah	8	Inpari 32	200	Des	Jan	Apr	40,000
				Mekar Sari	Desa Sukarare Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah	9	Inpari 32	225	Des	Jan	Apr	45,000
3	CV. Dua Bersaudara	L. M. Oriza Sativa S.	Gomong	Rahayu	Desa Jatisela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat	5	Inpari 32	125	Des	Jan	Apr	25,000
				Rahayu	Desa Jatisela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat	3	Tropiko	75	Jan	Feb	Mei	15,000
					Jumlah Total	50		1,250				250,000

RENCANA KERJA SAMA AREAL PENANGKARAN BENIH PADI NON HIBRIDA
PT SANG HYANG SERI (PERSERO) CABANG OPERASIONAL NTB
TAHUN 2020/2021

No	Lokasi				Keterangan					
								Prakiraan		
	Nama Vendor	Nama Pemilik Vendor	Desa	Kecamatan	Varietas	Areal (Ha)	Kebutuhan Benih (Kg)	Tanam	Panen	Hasil
1	UD. Usaha Tani	Martin Zuhdi	Pengadang	Praya Timur, Lombok Tengah	Inpari 32	100	2,500	April	Juli-Agustus	500,000
2	KPB. Tumbuh Bersatu	Jumatre	Sukarare	Jonggat, Lombok Tengah	Inpari 32	50	1,250	April/Mei	Juli-Agustus	250,000
3	CV. Dua Bersaudara	L. M. Oriza Sativa	Gomong	Kota Mataram	Inpari 32	50	1,250	April	Juli-Agustus	250,000
					Tropiko	25	625	April	Juli-Agustus	125,000
4	CV. Bahtera Laju	Endang Wahyuni	Monta	Monta Kabupaten Bima	Inpari 32	50	1,250	April/Mei	Juli-Agustus	250,000
	JUMLAH:					**275**	**5,625**			**1,125,000**

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27986/t/Aturan+Ekspor+Bibit+Lobster+Belum+Berlaku

Aturan Ekspor Bibit Lobster Belum Berlaku

01-03-2020/KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memastikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dibukanya keran ekspor bibit lobster, belum berlaku. Karena sampai saat ini Menteri KKP belum menandatangani peraturan itu, masih melakukan kajian dan koordinasi secara rutin bersama dengan Komisi IV DPR RI. Namun, Sudin tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut akan berlaku ke depannya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, apabila tidak mengganggu siklus dan kebutuhan lobster dalam negeri, pihaknya mendukung dengan diberlakukannya regulasi tersebut. Selain itu, maraknya fenomena penyelundupan bibit lobster ke luar negeri yang belakangan ini yang terjadi, menjadi salah satu faktor pertimbangan Komisi IV DPR RI terhadap regulasi itu.

“Kalau memang tidak mengganggu siklus dan kebutuhan dalam negeri, ya silahkan (regulasi ekspor bibit lobster diberlakukan),” kata Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau budi daya lobster di Kecamatan Jero Waru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu (1/3/2020).

Lanjut Sudin, Komisi IV DPR RI tidak akan tutup mata terhadap keresahan peternak lobster serta para pelaku usaha lobster. Pihaknya ke depannya akan berupaya menambah anggaran untuk pengembangan budi daya lobster di Indonesia. Selain itu, Komisi IV DPR RI berencana mendatangkan para ahli dari luar negeri, seperti dari Thailand atau Vietnam serta mendukung pengadaan sarana dan prasarana pengembangan budi daya lobster.

“Komisi IV DPR akan mendukung budi daya lobster, baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun pengadaan sarana prasarana serta tenaga ahli dari luar negeri untuk memberikan ilmunya di bidang lobster ini,” komitmen Sudin sembari meminta kepada para peternak lobster untuk tidak perlu khawatir dengan adanya rencana kebijakan yang baru dari KKP terkait diperbolehkannya ekspor bibit lobster.

Legislator dapil Lampung I itu memastikan, Komisi IV selalu mengawal kinerja dan program-program KKP demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebelumnya, sejumlah peternak lobster di NTB mengeluhkan dengan adanya kebijakan baru dari KKP terkait ekspor bibit lobster yang dinilai merugikan peternak. (qq/sf).

https://sinar5news.com/bupati-lotim-ntb-terima-bantuan-rp-38-m-untuk-bididaya-lobster-dari-komisi-iv-dpr-ri/

Bupati Lotim NTB, Terima bantuan Rp3,8 M. Untuk Budidaya Lobster. Dari Komisi IV DPR RI.

Sinar5news.com – Lotim – Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB) H.M.Sukiman Azmy menerima anggota Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja dan melihat dari dekat program Budidaya Udang Lobster,di Teluk Jukung dusun Telong-elong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Ahad (01/03/2020).

Bupati Sukiman yang menerima rombongan Komisi IV DPR RI tersebut dalam suasana hujan mengatakan hujan yang turun saat ini merupakan rakhmat dari Allah SWT bagi kami karena ada dibeberapa tempat di kabupaten Lombok Timur ini terutama diwilayah selatan Lombok Timur belum bisa bercocok tanam karena masih kekurangan dengan air.

“Alhamdulillah dengan hadirnya hujan ini kami semua akan bisa memulai bercocok tanam atas nama pimpinan daerah Kabupaten Lombok Timur dan segenap masyarakat Kabupaten Lombok Timur kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Pimpinan dan anggota komisi IV DPR-RI yang berkenan hadir di Kabupaten Lombok Timur untuk meninjau budidaya dibidang perikanan, dan kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian para anggota yang terhormat Kabupaten Lombok Timur terdiri atas 21 Kecamatan 254 desa dengan 1,3 juta penduduknya, ”Ungkapannya.

Sementara itu Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI Sudin SE menyampaikan,dirinya juga kecewa dengan kebijakan permen yang lama melarang untuk Budidaya Udang Lobster karena di kampungnya di Lampung itu banyak sekali pembudidaya Lobster tapi tidak boleh dijual tidak boleh langsung budidaya sehingga pada saat pergantian Mentri yang baru Sudin,SE sarankan untuk di kaji dulu Permen tersebut dengan baik kita pertimbangkan kembali manfaatnya untuk masyarakat.

“Kalau Pak Bupati mengatakan masalah tenaga kerja sekarang kita harus jadi dokter Pak Bupati, mungkin kalau ada para ahli yang memang sudah terkenal

seperti di Vietnam kita datangkan para ahli tersebut yang bisa mendidik, melatih melaksanakan budidaya lobster dengan baik kita didik kita latih masyarakat kita supaya bisa Propesional seperti Negara lain,”imbuhnya“Kalau Pak Bupati mengatakan masalah tenaga kerja sekarang kita harus jadi dokter Pak Bupati, mungkin kalau ada para ahli yang memang sudah terkenal seperti di Vietnam kita datangkan para ahli tersebut yang bisa mendidik, melatih melaksanakan budidaya lobster dengan baik kita didik kita latih masyarakat kita supaya bisa Propesional seperti Negara lain,”imbuhnya

Sudin,SE juga menambahkan, Pada tahun 2020 bantuan alat budidaya Lobster kami akan berikan senilai Rp. 3,8 Milyar. Dan jika bantuan ini berhasil maka di tahun berikutnya kami sepakat akan menambahkan lagi lima kali lipat jika situasi memungkinkan kami akan meninjau beberapa lokasi pelabuhan yang ada di lokasi budidaya Lobster.

”Ini bukan janji Calelg tetapi ini janji Dewan yang akan kami langsung realisasikan saat sekarang ini dan jika ada investor yang ingn kerja sama dengan kita dan saling menguntungkan maka terimalah mereka dan perlu kita ingat jaga lingkungan dan kebersihan laut,” Pungkasnya. (Bul).

http://ksdae.menlhk.go.id/info/7784/anggota-komisi-iv-dpr-ri-:-wajib-kunjungi-taman-nasional.html

Anggota Komisi IV DPR RI: Wajib Kunjungi Taman Nasional

Mataram, 5 Maret 2020. Itulah sepenggal kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja serta dialog bersama masyarakat di Resort Sembalun, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) pada hari Senin, 2 Maret 2020. Acara diawali dengan pemaparan Kepala Balai TNGR mengenai potensi keanekaragaman hayati, pengelolaan wisata pendakian dan beberapa hal penting yang menjadi fokus Taman Nasional Gunung Rinjani.

Dilanjutkan Ketua Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa pengelola taman nasional wajib membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten serta menciptakan hubungan yang harmonis. Ketua Komisi IV DPR RI juga menegaskan komitmen Komisi IV DPR RI untuk memberikan dukungan anggaran kepada Ditjen KSDAE sebesar 15 Milyar. Anggota komisi IV DPR RI asal NTB juga berkomitmen untuk menjadikan TN Gunung Rinjani sebagai destinasi wisata utama dan mengawal anggaran untuk taman nasional sehingga dapat terwujud pengelolaan taman nasional yang berkualitas dan berkelanjutan serta tidak terganggu oleh adanya destinasi wisata baru.

Kedatangan Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan yang didampingi oleh Dirjen KSDAE disambut oleh segenap jajaran pimpinan dan staf UPT KLHK di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah daerah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten Lombok Timur maupun masyarakat Lombok dengan pemasangan "SAPUQ" oleh Wakil Bupati Lombok Timur, Ketua Masyarakat Adat Sembalun dan Kepala SPTN Wilayah II Balai TNGR kepada Ketua Komisi IV DPR-RI, perwakilan anggota Komisi IV DPR-RI dan Dirjen KSDAE.

Dirjen KSDAE juga mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan dan dukungan komisi IV DPR-RI ke Taman Nasional. Semua unsur masyarakat harus mendapatkan manfaat dari keberadaan Taman Nasional. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam menjaga kelestarian hutan Taman Nasional dengan tidak melakukan penebangan pohon dan perburuan liar. Di akhir acara,

Dirjen KSDAE menyerahkan plakat kepada Ketua Komisi IV DPR RI dan Ketua Komisi IV DPR RI kepada Kepala Balai TNGR. Sebelum meninggalkan lokasi rombongan Komisi IV DPR RI, Wakil Bupati Lombok Timur dan Dirjen KSDAE melakukan penanaman bibit Ketapang Kencana, Klokos, Nangka, Alpukat dan Salam di halaman Kantor Resort Sembalun.

https://www.liputan.co.id/2020/03/komisi-iv-dpr-ri-dukung-kementan-jadikan-sembalun-sentra-benih-bawang-putih/

Komisi IV DPR-RI Dukung Kementan Jadikan Sembalun Sentra Benih Bawang Putih

Lombok Timur – Kawasan lereng Gunung Rinjani, tepatnya di wilayah Kecamatan Sembalun Lombok Timur sudah lama dikenal sebagai sentra produksi bawang putih. Didukung agroklimat yang sesuai dan petani yang sudah berpengalaman, menjadikan Sembalun sebagai kawasan andalan produksi bawang putih nasional. Bahkan produktivitas bawang putih yang dihasilkan dari kawasan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia. Produksi dari daerah tersebut juga digadang mampu mensuplai kebutuhan benih nasional.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, saat melakukan kunjungan kerja masa reses persidangan dalam rangka pemantauan kesiapan produksi bawang putih di Kecamatan Sembalun Lombok Timur NTB (2/3), meyakini kawasan Sembalun mampu menjadi sentra benih bawang putih unggulan nasional. “Saya yakin kawasan ini mampu menyediakan benih bawang putih lokal, baik dari lahan yang dibiayai oleh APBN, kemitraan importir maupun swadaya petani. Kami mewakili rakyat Indonesia hadir kesini bukan sekedar jalan-jalan. Tapi kami ingin menyelesaikan seluruh permasalahan bawang putih yang ada. Jangan ada yang ditutupi,” ujar Sudin yang hadir bersama Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, PT. Pupuk Indonesia, PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri, Perum BULOG, Perbankan dan dinas terkait setempat. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, saat melakukan kunjungan kerja masa reses persidangan dalam rangka pemantauan kesiapan produksi bawang putih di Kecamatan Sembalun Lombok Timur NTB (2/3), meyakini kawasan Sembalun mampu menjadi sentra benih bawang putih unggulan nasional. “Saya yakin kawasan ini mampu menyediakan benih bawang putih lokal, baik dari lahan yang dibiayai oleh APBN, kemitraan importir maupun swadaya petani. Kami mewakili rakyat Indonesia hadir kesini bukan sekedar jalan-jalan. Tapi kami ingin menyelesaikan seluruh permasalahan bawang putih yang ada. Jangan ada yang ditutupi,” ujar Sudin yang hadir bersama Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, PT. Pupuk Indonesia, PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri, Perum BULOG, Perbankan dan dinas terkait setempat.

Dihadapan para petani seusai meninjau kawasan bawang putih seluas 50 hektar di Desa Sajang Sembalun, Sudin minta agar jangan sampai ada tumpang tindih antara lahan yang dibiayai APBN dengan lahan yang dibiayai melalui kemitraan importir. “Kami bersama seluruh stake holders langsung terjun fokus selesaikan masalah. Sampaikan semua permasalahan secara transparan. Jangan bohong,” tegas wakil rakyat dari Dapil Lampung I tersebut.

Menanggapi sinyalemen tersebut, Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, menghimbau Dinas Pertanian Kabupaten sentra bawang putih seluruh Indonesia agar melakukan pemisahan (delineasi) yang jelas antara lokasi pengembangan yang dibiayai APBN dengan pengembangan kemitraan bersama importir. “Dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2020, sudah jelas mengatur pemisahan atau delineasi yang tegas antara kawasan APBN dengan lahan kemitraan importir, setidaknya sampai level wilayah kecamatan. Semuanya harus jelas agar tidak terjadi klaim pertanaman bawang putih. Mari sama-sama kita tingkatkan produksi bawang putih di dalam negeri. Tapi tolong jangan ada dusta diantara kita,” tegas pria yang akrab disapa Anton tersebut

“Sejak 2017 hingga 2019 kami sudah alokasikan anggaran Hortikultura ke Kabupaten Lombok Timur senilai Rp. 229 Milyar. Khusus untuk pengembangan kawasan bawang putih kami alokasikan 109 Milyar, atau setara 3.967 ha,” terang Anton. “Pemerintah serius mendukung pengembangan hortikuktura khususnya bawang putih di Sembalun, Lombok Timur. Bahkan kita beri kewenangan penuh daerah untuk mengelola sendiri melalui Tugas Pembantuan (TP) Mandiri,” imbuhnya. Menurut catatan pihaknya, sejak 2017 hingga 2019 terdapat 16 importir yang bermitra dengan petani Sembalun untuk menanam bawang putih sesuai Peraturan Menteri Pertanian. “Luasannya mencapai 993 hektar,” tukas Anton.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman mengatakan pihaknya bersama Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih akan mengawal proses sertifikasi benih bawang putih yang dihasilkan oleh para petani Sembalun. “Bawang putih di Sembalun memang kita fokuskan produksinya untuk mensuplai kebutuhan benih bawang putih nasional. Terbukti permintaan benih dari Sembalun diari berbagai propinsi sangat tinggi. Kami akan kawal proses sertifikasinya dengan baik. Jangan karena permintaan benih yang tinggi, melabel

begitu saja sesuai pesanan tanpa prosedur yang benar," ungkap Sukarman, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat.

Sukarman menyebut Pengawasan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sangat penting dalam menjamin kesuksesan pengembangan kawasan bawang putih. "Pengawasan seluruh mata rantai produksi benih bawang putih, sejak dari lahan hingga penyalurannya, akan menjamin tersedianya benih yang unggul sehingga produksi juga meningkat. Kita berharap tidak ada lagi cerita petani yang dirugikan akibat ulah oknum penyedia benih yang curang," tandasnya. Samiri, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Sembalun mengaku siap mengawal produksi benih bawang putih di daerahnya. "Potensi untuk pengembangan bawang putih di Kecamatan Sembalun sangat besar. Tahun 1984-1995 bawang putih Sembalun pernah berjaya. Melalui program pemerintah, bukan tidak mustahil kejayaan itu dapat dikembalikan lagi. Kami sudah menanam bawang putih secara turun temurun, bahkan saat wilayah lain tidak lagi menanam bawang putih, kami masih bertahan. Pada musim tanam 2020, hingga hari ini saja sudah tertanam sekitar 514 hektar. Melihat antusiasme petani, saya yakin luasannya akan terus bertambah" pungkas Samiri optimis. Hingga saat ini, ketergantungan yang masih tinggi terhadap bawang putih asal impor kerap memicu fluktuasi harga dan berbuntut inflasi pada bulan-bulan tertentu. Terlebih jika terjadi gangguan pasokan dari negara asal terutama China. Sementara produksi di dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 ribu ton setahun. Berdasarkan data Angka Sementara BPS, produksi bawang putih nasional tahun 2019 mencapai 88.437 ton. Sentra utamanya ada di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTB mampu menyumbang produksi 34,4% dari total produksi bawang putih nasional atau setara 30.453 ton. Sementara, produksi dari Sembalun mendominasi dengan kontribusi 56,6% dari total produksi NTB atau setara 17.235 ton. Tahun 2019 lalu, luas panen bawang putih Lombok Timur tercatat 1.453 hektar dengan produktivitas mencapai 11,86 ton per hektar. Capaian produktivitas tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional.

https://radarlombok.co.id/komisi-iv-dpr-ri-soroti-keberadaan-tps-dekat-gudang-beras-bulog.html

Komisi IV DPR RI Soroti Keberadaan TPS Dekat Gudang Beras Bulog

4 Maret 2020

MATARAM – Bau tidak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mendapat atensi dari Komis IV DPR RI dalam pelaksanaan kunjungan reses ke gudang Bulog Cakranegara II di Sweta, Selasa (3/3). Komisi IV DPR RI menyoroti keberadaan tumpukan sampah yang berhari –berhari di kantor LH Mataram bersebelahan langsung dengan gudang penyimpanan puluhan ribu ton beras Bulog Divre NTB.

Dalam kunjungan tersebut, pimpinan bersama anggota Komisi IV DPR RI melihat langsung kondisi dan bau tidak sedap yang masuk hingga ke gudang penyimpanan bahan pokok vital bagi manusia tersebut. Kunjungan Komisis IV DPR RI tersebut selain dihadiri jajaran Bulog Divre NTB juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Muhammad Nazarudin Fikri.

Dialog yang berlangsung di gudang Bulog Cakranegara II, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan tidak adanya langkah konkrit dari Pemerintah Kota Mataram dalam menyelesaikan persoalan sampah yang menjadikan kantor sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Padahal, di dekat kantor LH Mataram terdapat gudang penyimpanan beras puluhan ribu ton untuk memenuhi masyarakat tidak hanya di Mataram, tapi lebih luas lagi.

“Masalah tumpukan sampah di dekat gudang penyimpanan beras ini menjadi masalah serius. Karena ini masalah bahan pokok masyarakat luas dan NTB lagi. Pemerintah kota harus mencarikan solusi untuk memindahkan sampah ini dan tidak lagi menjadikan samping gudang Bulog sebagai TPS,” tegas Sudin dihadapan Kepala Dinas LH Mataram Muhammad Nazarudin Fikri yang disambut dengan anggukan kepala.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN H Syafrudin bahwa tidak semestinya pemerintah kota Mataram menjadikan TPS berdekatan langsung dengan gudang penyimpanan beras yang menjadi hajat hidup kebutuhan pokok masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, Rudi meminta Pemkot Mataram segera mencarikan solusi dan tidak lagi menjadikan kantor LH Mataram yang berdekatan langsung dengan gudang penyimpanan beras Bulog sebagai TPS.

“Kita minta relokasi sampah ini segera dilakukan. Karena ini masalah bahan konsumsi utama masyarakat NTB,” tegasnya.

Bahkan, komisi IV DPR RI meminta diareal tempat pembuangan sampah sementara di samping gudang Bulog Cakranegara II tersebut dipasangin police line agar tidak ada lagi pembuangan sampah ditempat tersebut, sembari memindahkan semua sampah yang saat ini menumpuk.

“Tumpukan sampah ini berbahaya, selain baunya yang menyengat, bisa saja virus bakteri di sampah itu masuk dan merusak beras yang tersimpan di gudang Bulog dan ini jauh lebih berbahaya dari virus corona bagi masyarakat NTB,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Muhammad Nazarudin Fikri mengaku untuk sementara ini hanya bisa mengangkut atau memindahkan sampah tersebut ke TPA Kebon Kongok secara bertahap.

“Kalau untuk relokasi sampah ke tempat lain, belum bisa. Karena belum ada tempat dan itu membutuhkan anggaran. Sementara kami juga kekurangan armada untuk mengangkut sampah setiap harinya,” kata Fikri. **(luk).**